

Globalisasi dan Implikasinya Bagi Birokrasi Publik

Philipus Keban

Departemen Administrasi, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

Abstract

The article examines the relationship between globalization and public administration using a political economic approach. Starting from the consideration of early concerns about globalization, it argues that the size of government has declined and its power has been eroded. Causes and consequences of globalization are discussed here. In addition, the article argues that globalization has threaten democracy process through the intervention of suprapstates in decision making process in poor and developing countries.

Key Words: globalization, public administration, hegemony, nation-state

Pendahuluan

Seiring dengan kemenangan kapitalisme global, globalisasi menjadi keniscayaan bagi setiap negara. Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, tak satu pun negara mampu membendung atau menahan laju globalisasi. Setertutup apa pun sistem (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) yang dianut sebuah negara, cepat atau lambat negara tersebut akan dihantam oleh gempuran globalisasi, sekalipun dengan intensitas yang berbeda dari negara lain. Meminjam pernyataan ekonom kondang Stiglitz, tak ada satu pun negara di dunia ini yang imun dari globalisasi, tak terkecuali negara-negara miskin dan berkembang. Di tengah kepungan globalisasi, setiap negara digiring menuju terciptanya integrasi global.

Tatanan Dunia Baru

Konsep tatanan dunia mengemuka setelah PD II. Setelah Michael Gorbachev menyerukan restrukturisasi global, keterbukaan, dan *peace for all*, konsep tatanan dunia baru (*new world order*) semakin mendapatkan tempatnya (Sedghi, 1992). Tatanan dunia baru dipahami sebagai sebuah sistem sekuritas kolektif dimana berbagai negara dan masya-rakat hidup dalam suasana damai satu sama lain tanpa mempertimbangkan ideologi yang dianut (Farazmand, 1994).

Bagi kebanyakan orang, globalisasi dipahami sebagai fondasi ideologi dari demokrasi kapitalis Barat. Ia menjadi kekuatan pendorong

bagi globalisasi demokrasi liberal Amerika dan Eropa Barat. Kata-kata kunci seperti kebebasan, individualisme, perdagangan bebas, dan demokrasi pluralistik menandai kekuatan ideologi globalisasi (Lindblom, 1977, 1990). Kekuatan normatif tersebut meng-gambarkan tentang ekonomi politik yang dimainkan oleh negara dan administrasi publik.

Dari perspektif administrasi publik, globalisasi dipahami sebagai internasionalisasi, yakni meningkatnya hubungan lintas batas antara organisasi dan komunitas di luar batas yuridiksi nasional. Keterbukaan batas wilayah dalam skala besar yang diiringi dengan mengendurnya hambatan regulasi dan proteksionisme, telah mempermudah hubungan transaksi finansial, komunikasi, perdagangan, dan budaya (Brown, 1992). Sebuah dunia tanpa batas menyatukan ekonomi, pemerintahan, dan budaya global yang homogen, dan implikasinya, sebuah sistem administrasi publik global (Scholte, 1997). Globalisasi administrasi publik berarti *thinking globally and acting locally*. Konsep-konsep seperti *the new world* (Cleveland, 1993), *the global village* (Garcia-Zamor and Khator, 1994), dan *global management* (Wilson, 1994) menandai perhatian globalisasi dan implikasinya bagi administrasi publik.

Sebab-sebab Globalisasi

Terlalu simplistis untuk mengatakan bahwa globalisasi semata-mata disebabkan oleh kemajuan kapitalisme, meskipun hal tersebut

merupakan faktor utama dari globalisasi. Beberapa faktor lain turut memberi kontribusi bagi proses globalisasi, diantaranya adalah surplus akumulasi kapital korporasi, dominannya peran negara dan birokrasi, hambatan-hambatan domestik, dan inovasi teknologi. Dari berbagai faktor tersebut, akumulasi surplus merupakan faktor yang paling menentukan globalisasi kapitalisme.

Percepatan derap langkah globalisasi terjadi setelah PD II, kemudian mencapai puncaknya pada tahun 1990-an. Sebagai jantung kapitalisme, akumulasi surplus (*profit*) membutuhkan ekspansi secara konstan demi menjaga keberlanjutan kapitalisme. Globalisasi menjadi ciri utama korporasi multinasional yang selama bertahun-tahun meraih pasar global dan menikmati murahness tenaga kerja di negara miskin. Yang baru adalah tingginya tingkat kecepatan dan angka akumulasi surplus sebagai capaian dari mobilitas korporasi di dalam wilayah yang tak terbatas.

Kemunculan dan ekspansi korporasi multinasional menyebabkan konsentrasi kekuatan global pada level vertikal dan horisontal (Korten, 1995; Brown, 1992; Brecher and Costello, 1994). Pada tahun 1960, jumlah korporasi global sebanyak 3.500, kemudian pada tahun 1995 meningkat menjadi 40.000 (UNCTAD, 1996). Secara vertikal, terjadi peningkatan jumlah aliansi strategis di antara berbagai perusahaan global, dan proses merger dan akuisisi mencapai 6000 dalam tahun 1995, dengan nilai agregat sebesar \$ 229,4 billion (Financial Times, Jan. 20, 22). Sebanyak 300 perusahaan transnasional terbesar mengontrol 70% investasi luar negeri dan hampir 1/3 dari total aset seluruh korporasi di seluruh dunia (Dunning, 1993, 15; Harvey, 1995, 189). Struktur terpusat juga menghasilkan elit-elit manajerial yang mempengaruhi kebijakan publik dan keputusan administratif di sebagian besar negara.

Ironisnya, kapitalisme membutuhkan sebuah negara yang kuat dan lingkungan yang stabil. Kapitalisme membutuhkan keteraturan dan kontrol sosial (Weber, 1947; Offe, 1985). Pemerintah yang dominan, khususnya US dan mitranya negara Eropa, telah memainkan peran penting dalam mendorong globalisasi kapital sepanjang abad ini. Mereka

mengalokasikan anggaran pembiayaan dalam jumlah besar untuk kepentingan militer dan sistem keamanan sebagai upaya melindungi dan menyokong akumulasi kapital di negara-negara miskin. Mereka mengintervensi banyak negara, menggantikan pemerintah yang legitim, dan menanamkan dan mendukung kekuatan represif dan rejim yang korup di dunia.

Khususnya semenjak PD II, pemerintah Barat telah menanamkan ideologi, sistem nilai, dan sistem pemerintahan beserta administrasinya sebagai model ideal. Intervensi dan invasi yang dilakukan Amerika di Asia, Amerika Latin, Afrika, dan Timur Tengah telah memberikan keuntungan besar sebagai perlindungan bagi kepentingan global Amerika (Ball, 1967; Hamilton, 1989; Murphy, 1988).

Kapitalisme membutuhkan hadirnya negara dan birokrasi yang tangguh, dan elit bisnis yang *powerful* untuk mendominasi proses kebijakan dan mempengaruhi hasil kebijakan tersebut. Intervensi pemerintah dilakukan untuk melindungi sistem dari keruntuhan periodik dan memberikan jaring pengaman untuk mendukung pengembangan kapitalis. Dengan demikian, negara, melalui pembiayaan publik, memainkan peran penting dalam percepatan pembangunan baik kapitalisme maupun globalisasi demi sebuah tatanan dunia baru.

Di tahun 70-an terjadi kemuduran ekonomi domestik yang ditandai oleh krisis energi, defisit anggaran, krisis politik, dan krisis kepercayaan dalam kinerja elit-elit pemerintahan dan korporat. Problem domestik tersebut dibarengi dengan revolusi di Iran dan Nikaragua yang ditujukan bagi Amerika dan kekuatan Barat lainnya. Akibatnya adalah negara menghadapi krisis legitimasi dari masyarakatnya sendiri. Negara tidak mampu mempercepat akumulasi kapital sehingga mempengaruhi krisis fiskal. Hal-hal tersebut, pada gilirannya, mendorong banyak korporasi ke arah globalisasi.

Laju globalisasi pun tak lepas dari peran PBB sebagai kekuatan pendorong utama. Sejak tahun 1970, organisasi afliasinya, seperti Bank Dunia dan IMF, dan WTO telah menjadi instrumen yang *powerful* dalam proses globalisasi, yang didominasi dan dikontrol terutama oleh

Trilateral (Amerika, beberapa pemerintah Eropa Barat, dan Jepang), donor kunci bantuan internasional. Dalam dua dekade terakhir, organisasi supranasional ini telah memainkan peran efektif dalam globalisasi melalui persyaratan “penyesuaian struktural” yang didiktekan bagi negara-negara miskin dan kurang berkembang yang membutuhkan bantuan internasional (Chan, 1996).

Ciri dari program penyesuaian struktural adalah reformasi utama bagi skema-skema regulator, finansial, dan administrasi yang diberikan pada negara-negara tersebut. Termasuk di dalamnya adalah program privatisasi secara masif dan promosi subsidi sektor privat, menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan dan hambatan lainnya, insentif pajak untuk perusahaan, menciptakan hukum tenaga kerja yang bernuansa pemihakan pada penggunaan tenaga kerja murah, penekanan pada produksi yang berorientasi ekspor dan pertumbuhan ekonomi versus pembangunan, dan pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi (Hancock, 1989; Korten, 1995; Gill and Law, 1991; Brown, 1992).

Konsekuensi Negatif Globalisasi

Konsekuensi negatif globalisasi diantaranya adalah berkurangnya atau hilangnya kekuatan negara, menghambat demokrasi, hilangnya semangat komunitas, konsentrasi struktur kekuatan global, meningkatnya sentralisasi elit-elit korporat dan organisasi pemerintah, dan meningkatnya dependensi diantara negara miskin pada kekuatan-kekuatan global.

Kekuatan negara tergantung pada teritorialitas, dan kewenangan hukum atas tanah, udara, dan laut (Helleiner, 1994; Scholte, 1997). Tetapi peran utama negara dalam kapitalisme, pada saat yang sama, mengancam identitas negara (Vernon, 1971). Hilangnya kemampuan unilateral negara-bangsa untuk menjalankan kebijakan makro ekonomi secara komprehensif. Banyak negara menyerahkan kemampuan pembuatan keputusan nasional kepada organisasi regional atau internasional. Beberapa pemerintahan bahkan telah merevisi konstitusinya demi kepentingan kolaborasi regional (misalnya, Italy, Portugal, dan Spanyol dalam “European Community”, negara-negara Amerika Latin juga melakukan hal yang sama dalam

“Transamerican Community”). Semenjak tahun 1970an, IMF, Bank Dunia, dan WTO telah melakukan ukuran-ukuran kebijakan moneter dan fiskal yang otoritatif bagi negara-negara miskin atau terbelakang. Program-program penyesuaian struktural yang telah disebutkan diatas telah memaksa negara-negara tersebut ke dalam reformasi dan perubahan yang semakin memperkuat ketergantungannya pada korporasi global dan pemerintah yang tangguh.

Tahun 1994, Bank Dunia menyediakan sekitar \$200 billion bagi negara Dunia Ketiga dalam dekade berikutnya untuk mendorong sektor privat (Milman and Lundstedt, 1994, 1667). Beberapa bentuk pinjaman internasional justru semakin memperkuat dependensi finansial, militer, politik, dan ekonomi pada kekuatan negara-negara Barat dan elit-elit global, yang secara gampang mendikte segenap pilihan kebijakan bagi negara-negara miskin dan terbelakang. Juga tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan bantuan luar negeri dan pinjaman internasional akan kembali juga pada negara-negara donor (Hudson, 1971). Hancock (1989) menyebut para penguasa Bank Dunia sebagai “the lords of poverty” mengantar arah kebijakan global melalui “elit-elit organisasi” (Farazmand, 1997a,b) yang menjalankan preferensi kebijakan dari elit-elit korporat global (Useem, 1984; Domhoff, 1970).

Ekspansi kapital global membawa ancaman bagi demokrasi di seluruh dunia. Fakta bahwa organisasi global seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, juga beberapa elit transnasional yang mendikte kebijakan fiskal, moneter, dan penyesuaian struktural lainnya bagi negara-negara miskin dan terbelakang, merupakan negasi bagi demokrasi lokal. Masyarakat di negara-negara tersebut tidak dapat melaksanakan hak asasi manusia dan warga negaranya untuk menentukan pilihan-pilihan kebijakannya sendiri; bangsa dan kepentingan masyarakatnya dikorbankan untuk kepentingan kekuatan dominan (Hancock, 1989).

Globalisasi mengakibatkan semakin megunatnya kemiskinan, disintegrasi sosial, dan kerusakan lingkungan. Globalisasi korporasi telah mengakibatkan kerusakan produksi-produksi ekonomi domestik yang mendukung upaya ekspor. Masyarakat di kebanyakan negara ini telah melakukan perjuangan menen-

tang rejim represif dan elit politik administrasi yang didukung oleh korporasi global dan demokrasi Barat, termasuk USA (Cottam, 1979; LaFeber, 1984; Mander and Goldsmith, 1996). Ancaman juga ada pada demokrasi Barat, ketika korporasi-korporasi global menutup pabriknya dan mengambil wilayah bisnisnya di negara-negara lain tanpa mempertimbangkan komunitas lokalnya (Wilson, 1997), atau ketika investasi luar negeri dalam perusahaan-perusahaan domestik dibuat tanpa input dari komunitas lokal. Masyarakat lokal telah kehilangan kontrol terhadap komunitasnya sendiri (Mele, 1997; Korten, 1995, 22).

Globalisasi mendorong privatisasi sebagai suatu bagian dari program penyesuaian struktural, memberdayakan pertumbuhan elit (para burjois yang patuh) sebagai agen dari korporasi transdunia, dan menciptakan korupsi di negara-negara terbelakang. Misalnya, Chile digunakan sebagai model dari privatisasi eko-nomi, sementara faktanya adalah sepertiga populasinya hidup dalam kemiskinan akut, dan birokrasi militer dan elit bisnis menikmati gaya hidup kelas dunia (Rehren, 1999; Gould, 1991). Pemberdayaan elit menuju pada struktur organisasi global baru dengan karakteristiknya sebagai *global corporate empire* yang mensyaratkan fleksibilitas transformasi struktur kekuatan dunia. Konsentrasinya serupa dengan kolonialisme, dengan empat elemen, yakni (1) rasionalisasi kompetensi inti organisasi; (2) komputerisasi dan otomasi; (3) merger, akuisisi, dan aliansi strategis; (4) tim kerja dan moral diantara para personel (Harrison, 1993). Globalisasi memberdayakan dominasi elit di bawah tatanan dunia baru dimana teori hegemoni ada bersamaan dengan globalisasi kapital (Korten, 1995).

Meluasnya globalisasi kemudian menimbulkan dua respon intelektual yang berbeda. Di satu sisi, pertumbuhan korporasi transnasional dan meluasnya kapitalisme global menyebabkan peran negara dan administrasi (birokrasi) publik menjadi terbatas. Sejumlah pakar bahkan mengisyaratkan ancaman globalisasi terhadap eksistensi sebuah negara (Ball, 1967; Naisbitt, 1994; O'hame, 1995), menandai berakhirnya era negara bangsa dan administrasi (birokrasi) publik (Stever, 1988). Lebih jauh, globalisasi memperdalam tingkat ketergan-

tungan negara miskin terhadap negara maju, dan menyisakan problem tersendiri bagi tata kelola pemerintahan (Kregel, 1998).

Di sisi lain, tidak sedikit sarjana yang secara lantang menolak pandangan tentang berakhirnya peran *state*. Bagi mereka, peran *nation-state* akan tetap ada dengan segala implikasinya bagi administrasi publik. Hirst dan Thompson (1996), Zysman (1996), dan Boyer dan Drache (1996) berpendapat bahwa walaupun fenomena globalisasi kian tak terbendung, namun eksistensi negara masih kokoh dalam fungsi-fungsi *governance* yang krusial. Globalisasi tidak mematikan negara dan birokrasinya, tidak juga mengakibatkan suatu kemunduran negara di masa datang. Wilayah teritorial negara sebagai identitas sosio politik akan tetap eksis. Hubungan antara pasar dan politik, kapitalisme dan negara, manajemen sektor publik dan swasta menjadi semakin terbuka. Hubungan tetap ada karena administrasi publik dan peradaban, termasuk peradaban kapitalis, telah koeksis dan mendukung satu sama lain (Waldo, 1980/1992) dengan sebuah birokrasi yang juga mempertahankan perubahan-perubahan politik dan ekonomi (Heady, 1996; Farazmand, 1998a, 1996b).

Implikasi Globalisasi terhadap Administrasi Publik

Globalisasi dan tatanan dunia baru memberikan implikasi bagi administrasi publik. Lepas dari pertentangan intelektual di atas, diakui bahwa globalisme telah mengubah keberadaan administrasi negara (birokrasi) di seluruh dunia. Struktur ekonomi global, dengan begitu banyaknya perubahan suprastruktur dan kekuasaan suprateritorial, telah membawa implikasi mendalam bagi birokrasi. Kekuasaan maupun kewenangan negara semakin tereduksi baik dalam konteks kualitas maupun kuantitasnya. Di berbagai belahan dunia, karakter negara mengalami perubahan secara masif. Meminjam istilahnya Milward (1994), kini masyarakat hidup dalam era *the hallow state* dan terjadi pergeseran dari *welfare administrative state* ke arah *corporate state*.

Pertama, perubahan mendasar konfigurasi dalam lingkup publik-privat dalam mendukung globalisasi korporat. Peran utama

pemerintah dan sektor publik dalam alokasi risorsis, distribusi kesejahteraan secara merata, stabilisasi ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi telah dikesampingkan oleh elit-elit korporat. Dengan runtuhnya Uni Soviet dan meningkatnya globalisasi, juga krisis finansial negara, maka negara dengan administrasi tradisionalnya mendapatkan serangan dari segala arah, khususnya dari elit-elit korporat yang tidak lagi mengindahkan adanya *welfare state*. Hal ini menyebabkan lingkup publik dan ruang bagi keterlibatan warga negara telah menyusut sebagai akibat dari globalisasi dan restrukturisasi pemerintah (Rockman, 1997; Habermas, 1974; Offe, 1985).

Kedua, perubahan karakter dan aktivitas negara dan administrasi publik dari *civil administration* kepada *non-civil administration* (Farazmand, 1997). Selama beberapa dekade, sistem administrasi negara tradisional menjaga keseimbangan kepentingan elit-elit korporat dengan kepentingan publik, sehingga menjaga stabilitas sosial dan politik bagi akumulasi kapital dan sistem legitimasi. Namun kini, sistem tersebut telah tergantikan oleh adanya *corporate-coercive state*, yang dicirikan oleh adanya birokrasi koersif yang mengancam tertib sosial. Warga negara terancam oleh *chaos* pasar di bawah tekanan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh globalisasi dan marketisasi (Schneider, 1993; Farazmand, 1997a,b,c).

Ketiga, globalisasi mendorong privatisasi, membuka peluang terciptanya korupsi (Gould, 1991). Privatisasi juga mengancam kepercayaan warga negara akan kepemimpinan dan sistem legitimasi. Privatisasi didasarkan pada *rational choice theory* yakni adanya individu yang cenderung *self-interested* pada tataran komunitas dan masyarakat. Filosofi ini menempatkan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat atau komunitas (Bellah et al., 1991; Triandis, 1995); inilah yang sesungguhnya sedang diupayakan oleh berbagai perusahaan transnasional untuk membangun budaya konsumerisme global yang menyatukan budaya nasional ke dalam sebuah budaya global (Schein, 1985). Globalisasi mendukung elitisme dan memperkaya elit bisnis, politik, militer, dan manajer yang bekerja sebagai agen korporasi transnasional.

Globalisasi mengancam keberadaan komunitas (Korten, 1995) dan *public spiritedness* – meminjam istilah Frederickson 1997 – dengan mengganti kontrol lokal dan tidak digunakannya prinsip partisipasi dalam membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Administrator publik hendaknya berupaya untuk mengurangi ketidakpastian yang ada dari korporasi global tersebut. Mereka juga hendaknya membangun rasa kebersamaan, melibatkan partisipasi masyarakat dalam administrasi, dan mendorong nilai-nilai kemasyarakatan dan komunitas/ kepentingan publik sehingga bisa menyeimbangkan pandangan kepentingan pribadi.

Meningkatnya ledakan pengetahuan dalam administrasi publik, termasuk bidang “comparative public administration” dan “international administration” (Savitch, 1998). Ledakan globalisasi menyebabkan perlu adanya integrasi studi administrasi publik baik dari perspektif komparatif, internasional, dan global. Mempelajari lebih banyak tentang “comparative public administration” akan memperluas pemahaman para pembelajar administrasi dengan menggunakan fondasi budaya, institusional, dan religius dari negara-negara terbelakang, yang memiliki warisan kekayaan kultural dan pemerintahan.

Globalisasi juga membuka kesadaran manusia. Kaum profesional memiliki peluang dan tanggung jawab untuk mengetahui dan menindak segala persoalan yang terjadi. Isu-isu seperti pencabutan hak-hak kaum miskin, destruksi lingkungan, pemanasan global, ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Meningkatnya kesadaran akan isu-isu global baik yang positif dan negatif, sangat penting dan perlu, karena para administrator publik dapat melakukan pembedaan ketikan membuat keputusan yang mempengaruhi warga negaranya.

Penutup

Sebagai penjaga kepentingan komunitas global, para administrator publik di negara-negara miskin dan berkembang memiliki tanggung jawab global untuk bertindak etis dan bermoral. Globalisasi juga tidak akan mematikan eksistensi negara dan administrasi publik. Yang ada adalah tantangan global baru yang memperluas cakupan penelitian, praktek,

dan pembelajaran administrasi publik. Administrasi publik baru saja memasuki tahapan baru dalam peradaban manusia, dengan harapan adanya kemakmuran bagi semua manusia sebagai hasil yang ingin diraih.

Daftar Pustaka

- Ball, George (1967). "Cosmocrorporations: The Importance of Being Stateless." *Columbia Journal of World Business* 7. (6).
- Bellah, Robert, Richard Madson, William Sullivan, Ann Swiddler, and Steven Tipton (1985). *Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Boyer, Robert, and Daniel Drache, eds. (1996). *States Against Markets: The Limits of Globalization*. Lxandon: Routledge.
- Brecher, Jeremy and Tim Costello (1994). *Global Village or Global Pillage: Economic Reconstruction Trom the Bottom Up*. Boston, MA: South End Press.
- Brown, Seyom (1992). *International Relations in a Changing Global System: Toward a Theory of World Polity*. Boulder, CO: Westview Press.
- Caiden, Gerald (1994). "Globalizing the Theory and Practice of Public Administration." In Jean-Claude Carcia-Zamor and Renu Khator, eds. *Public Administration in the Global Village*. Westport, CT: Praeger, 45-59.
- Chan, Johnathan (1996). "Challenging the New Imperial Authority: The World Bank and the Democratization of Development." *Harvard Human Rights fournal* 6.
- Cleveland, Harlan (1993). *Birth of a New World: An Open Moment for International Leadership*. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
- Cottam, Richard (1979). "Goodbye to America's Shah." *Eoreign SICA Jubilee: Globalization and Public Administration* 519 *Policy* {34}: 3-14.
- Domhoff, William (1970). *The Higher Circles*. New York: Random House.
- Dugger, William (1989). *Corporate Hegemony*. New York: Greenwood Press.
- Dunning, J.H. (1993). *The Globalization of Business: The Challenge of the 1990s*. London: Roudedge.
- Esman, Milton (2000). "The State, Government Bureaucracies, and their Alternatives." In Aii Farazmand, ed.. *Handbook of Comparative and Devebpment Public Administration*, 2nd ed. New York: Marcel Dekker.
- Farazmand, Aii (1989). *The State, Bureaucracy, and Revolution in Modem Iran: Agrarian Reform and Regime Politics*. New York: Praeger.
- , ed. (1991a). *Handbook of Comparative and Devebpment Public Administration*. New York: Marcel Dekker.
- (1991b). "Globalization of Agrarian Reforms: The Role of Multinational Corporations." Paper presented at the World Congress of the International Political Science Association, Buenos Aires, Argentina, July 21-26.
- (1994). "The New World Order and Global Public Administration: A Critical Essay." In Jean-Claude Garcia-Zamor and Renu Khator, eds.. *Public Administration in the Global Village*. Westport, CT: Praeger, 62-81.
- (1996a). "Introduction: The Comparative State of Public Enterprise Management." In Aii Farazmand, ed. *Public Enterprise Management: International Case Studies*. Westport, CT: Greenwood Press, 1-27.
- (1996b). "Development and Comparative Public Administration: Past, Present, and Future." *Public Administration Quarterly* 2Q{3}: 343-364.
- (1997a). "From Civil to Non-Civil Administration: The Biggest Challenge to the State and Public Administration." Paper Presented at the 1997 ASPA Conference, Philadelphia, July.
- (1997b). "Institutionalization of the New Administraence of the American Political Science Association, Washington, DC, August 28-31.
- (1997c). "Bureaucracy is Alive and WeU: The Order that Supports Market Chaos." *Public Administration Times* 20(11): 5.
- (1998a). "Contributions of the Ancient Civilizations to Modern Public

- Administration: A Symposium." *International Journal of Public Administration* 21 (1): 1-6.
- (1998b). "Building a Community-Based Administrative State/Role." Paper Presented at the 1997 Annual Conference State Under the New World Order." Paper Presented at the 1998 Annual Conference of the American Political Science Association, September 2-6.
- Garcia-Zamor, Jean-Claude, and Renu Khator (1994). *Public Administration in the Global Village*. Westport, CT: Praeger.
- Gill, Stephen, and David Law (1994). *The Global Political Economy*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Habermas, Jürgen (1974). "The Public Sphere." *New Government Critique* 3: 49-55.
- Hamilton, Edward (1989). *America's Global Interests: A New Agenda*. New York: W.W. Norton.
- Hancock, Graham (1989). *Lords of Poverty*. New York: Atlantic Monthly Press.
- Heady, Ferrel (1996). *Public Administration: A Comparative Perspective*, 5th ed. New York: Marcel Dekker.
- (1998). "Comparative and International Public Administration: Building Intellectual Bridges." *Public Administration Review* 58(1):32-39.
- Helleiner, E. (1994). *States and the Re-Emergence of Global Finance: From Bretton Woods to the 1990s*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Henry, Nicholas (1995). *Public Administration and Public Affairs*, 6th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Hudson, Michael (1971). "The Political Economy of Foreign Aid." In Dennis Goulet and Michael Hudson, eds. *The Myth of Aid*. New York: IDOC North America.
- Khator, Renu (1994). "Managing the Environment in an Interdependent World." In Jean-Claude Garcia-Zamor and Renu Khator, eds.. *Public Administration in the Global Village*. Westport, CT: Praeger, 83-98.
- Korten, Alicia (1993). "Cultivating Disaster: Structural Adjustment and Costa Rican Agriculture." *Multinational Monitor*, July/August: 20-23.
- Korten, David (1995). *When Corporations Rule the World*. West Hartford, CT: Kumarian Press.
- Kregel, Jan (1998). "The Strong Arm of the IMF." *Report, of the Jerome Levy Economic Institute of Bard College* 8(1): 7-8.
- LeFebvre, W. (1984). *Inevitable Revolutions: The United States in Central America*. New York: W.W. Norton.
- Lindblom, Charles (1977). *Politics and Markets: The World's Political-Economy Systems*. New York: Basic Books.
- (1990). *Inquiry and Change*. New Haven: Yale University Press.
- Lowi, Theodore (1996). *The End of the Republican Era*. Norman, OK: University of Oklahoma Press.
- Mander, Jerry, and Edward Goldsmith, eds. (1996). *The Case Against the Global Economy and For a Return Toward Local*. San Francisco, CA: Sierra Club Books.
- Milman, C. And S. Lundstedt (1994). "Privatizing State-Owned Enterprises in Latin America: A Research Agenda." *International Journal of Public Administration* 17(9): 1663-1677.
- Milward, Brinton (1994). "Nonprofit contracting and the Hollow State: A Book Review." *Public Administration Review* 54 (1): 73-76.
- Murphy, Richard (1988). *Protecting US Interests in the [Persian] Gulf*. Washington, DC: National Council on U.S.-Arab Relations.
- Naisbitt, John (1994). *The Global Paradox: The Bigger the World Economy the More Powerful Its Smallest Players*. London: Brealey.
- Offe, C. (1985). *Disorganized Capitalism*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Ohmae, Kenichi (1990). *The Borderless World*. London: Harper-Collins.
- (1995). *The End of the Nation-State: The Rise of Regional SICA Jubilee: Globalization and Public Administration* 521 *Economies*. London: Harper-Collins.
- Peters, Guy (1991). "Government Reform and Reorganization in an Era of Retrenchment and Conviction Politics." In Aii Farazmand, ed. *Handbook of Comparative and Development*. New York: Marcel Dekker, 381-403.

- (1997). "Bureaucrats and Political Appointees in European Democracies: Who's Who and Does it Make Any Difference?" In Ali Farazmand, ed., *Modern Systems of Government: Expanding the Role of Bureaucrats and Politicians*. Thousand Oaks, CA: Sage, 232-254.
- Riggs, Frederick (1994). "Global Forces and the Discipline of Public Administration." In Jean-Claude Garcia-2lamor and Renu Khator, eds., *Public Administration in the Global Village*. Westport, CT: Praeger, 17-44.
- (1998). "Public Administration in America: Why Our Uniqueness is Exceptional and Important." *Public Administration Review* 58(1): 22-31.
- Rockman, Bert (1997). "Honey: I Shrunk the State." In Ali Farazmand, ed., *Modern Systems of Government: Expanding the Role of Bureaucrats and Politicians*. Thousand Oaks, CA: Sage, 275-294.
- Savitch, H.V. (1998). "Global Challenge and Institutional Capacity: Or How We Can Refit Local Administration for the Next Century." *Administration & Society* 30 (3): 248-273.
- Schein, Edgar (1985). *Organizational Culture and Leadership*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Schneider, Susan (1992/1993). "National vs. Corporate Culture: Implications for Human Resources Management." In Valdimir Pucik, Noel Tichy, and Carole Barnert, eds., *Globalizing Management*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 159-173.
- Scholte, J. A. (1997). "Global Capitalism and the State." *International Affairs* 73 (3): 427-452.
- Sedghi, Hamideh (1992). "The Persian Gulf War: The New International Order or Disorder?" *New Political Science* 21 122: 41-60.
- Stever, James (1988). *The End of Public Administration*. New York: Transnational Publications.
- Triandis, Harry (1995). *Individualism and Collectivism*. Boulder, CO: Westview Press.
- Trudeau, Edc (1992). "The World Order Checklist." *New York Times*. 19 February, 2.
- UNCTAD (1996a). *Globalization and Liberalization: Development in the Pace of Two Powerful Currents. Report of the Secretary General of UNCTAD to the Ninth Session of the Conference*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- (1996b). *Transnational Corporations and World Development*. London: International Thomson Business Press.
- Useem, Michael (1984). *The Inner Circle*. New York: Oxford University Press.
- Vernon, R. (1971). *Sovereignty at Bay*. New York: Basic Books.
- Waldo, Dwight (1980/1990). *The Enterprise of Public Administration*. Navota, CA: Chandler & Sharp Publisher.
- Weber, Max (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. In A.M. Henderson and Talcott Parsons, eds. and trans. New York: Oxford University Press.
- Wilson, David (1994). "Bureaucracy in International Organizations: Building Capacity and Credibility in a Newly Interdependent World." In Ali Farazmand, ed., *Handbook of Bureaucracy*. New York: Marcel Dekker, 305-318.